

INDONESIA (TIDAK) SIAP REDENOMINASI (?)

Ayu Marjuni¹⁾, Ridho Setyawan²⁾, Maryani³⁾

UINFAS Bengkulu¹⁾, UIN Datokarama Palu²⁾, Universitas Achmad Yani Banjarmasin³⁾
ayumarjuni6@gmail.com¹⁾, ridho.setyawan88@gmail.com²⁾, yanimaryani@gmail.com³⁾

ABSTRACT

Redenomination is a simplification of the value of a currency to achieve certain goals in an economic system. Redenomination administratively only concerns the technicalities of writing money. But in its implementation it is not as simple as administration, considering that it is related to the economy of a country. It is necessary to take steps as an analysis of a country's readiness to carry out the redenomination, considering the history of recording several countries failing to redenominate which results in inflation. This paper was conducted as part of an effort to analyze Indonesia's readiness to redenominate it. This paper uses the literature method in its approach. The results showed that at least 8 (eight) minutes are needed in the implementation of redenomination. This is by considering economic fundamentals including bonds, inflation, and economic growth rates. If this is ignored then the potential negative effects can actually occur, and will repeat the annals of world history, countries that failed to redenominate one, one of them in terms of money illusions. In the end, by policy regulation, redenomination can already be implemented, but in its implementation requires a certain time, and not in the near future.

Keywords: *Redenomination, Inflation, Money Illusion*

ABSTRAK

Redenominasi merupakan penyederhanaan nilai sebuah mata uang untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah sistem perekonomian. Redenominasi secara administrasi hanyalah menyangkut teknis penulisan uang. Namun dalam implementasinya tidak sesederhana administrasi, mengingat berhubungan dengan perekonomian suatu negara. Perlu dilakukan langkah-langkah sebagai analisis kesiapan sebuah negara dalam melakukan redenominasi tersebut, mengingat sejarah mencatat beberapa negara gagal dalam melakukan redenominasi yang berakibat pada terjadinya inflasi. Tulisan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya analisis kesiapan Indonesia dalam melakukan redenominasi. Tulisan ini menggunakan metode kepustakaan dalam pendekatannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setidaknya diperlukan waktu minimal 8 (delapan) dalam implementasi redenominasi. Hal ini dengan mempertimbangkan fundamental ekonomi di antaranya obligasi, inflasi, dan laju pertumbuhan ekonomi. Jika hal ini diabaikan maka potensi dampak negatif justru dapat terjadi, dan akan mengulang catatan sejarah dunia, negara-negara yang gagal dalam melakukan redenominasi, salah satunya dalam hal ilusi uang. Pada akhirnya, secara regulasi kebijakan, redenominasi sudah dapat dilaksanakan, namun dalam implementasinya memerlukan waktu tertentu, dan tidak dalam waktu dekat.

Kata kunci: Redenominasi, Inflasi, Ilusi Uang

PENDAHULUAN

Redenominasi dapat diartikan sebagai proses dimana suatu unit digunakan sebagai unit baru dengan rasio tertentu, serta dilakukan dengan tujuan mengoreksi nilai uang, struktur harga, dan meningkatkan kredibilitas (Astrini et al., 2016). Redenominasi diartikan pula sebagai penyederhanaan nilai atau nominal pada mata uang tertentu tanpa mengubah nilai tukar uang tersebut. Nilai intrinstik sebuah mata uang dalam hal ini adalah tetap (Tjandrasa & Lomo, 2018). Melalui redenominasi, suatu negara merubah sistem perekonomiannya elalui perubahan nilai mata uang.

Inflasi pada dasarnya merupakan kenaikan harga yang bersifat umum dan terjadi secara terus menerus. Inflasi merupakan gambaran harga-harga di suatu negara (Handayani, 2020). Atas dasar besarnya laju inflasi, inflasi dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) kriteria, yaitu : merayap (*creeping inflation*); menengah (*galloping inflation*); dan inflasi tinggi (*hyper inflation*). *Creeping inflation* ditandai dengan laju inflasi yang rendah (kurang dari 10% per tahun). Inflasi menengah (*galloping inflation*) ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar (biasanya double digit atau bahkan kadang-kala berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi, artinya harga pada minggu/bulan ini lebih tinggi dari minggu/bulan lalu. Efek inflasi menengah lebih berat daripada inflasi merayap. Inflasi tinggi (*hyper inflation*) merupakan inflasi yang paling parah, akibatnya harga sampai 5 (lima) atau 6 (enam) kali lipat. Nilai uang menurun dengan tajam sehingga ingin ditukarkan dengan barang. Perputaran uang makin cepat naik secara akselerasi. Biasanya keadaan ini timbul apabila pemerintah mengalami defisit anggaran belanja (Prabawani, 2017). Kewaspadaan terhadap adanya infasi tinggi menghantui para negara dalam mengambil kebijakan redenominasi.

Redenominasi merupakan salah satu upaya dalam mengatasi inflasi. Namun disisi lain, redenominasi justru dapat membuat krisis ekonomi melalui inflasi (Ifunanya et al., 2021). Redenominasi bertujuan untuk memudahkan catatan transaksi keuangan; meningkatkan martabat suatu mata uang; dan melakukan kesetaraan ekonomi dengan regional (Abdul-salam, 2021). Redenominasi adalah kegiatan administratif pemerintahan namun dapat merubah tata kelola dan eksistensinya di mata dunia.

Syarat utama melakukan redenominasi adalah pemenuhan syarat, yaitu: kestabilan ekonomi; tingkat inflasi yang terjaga; dan adanya jaminan stabilitas harga (Karnadi & Adijaya, 2017). Pendapat lain mengatakan redenominasi yang baik setidaknya memerlukan 4 (empat) syarat utama, yaitu: inflasi stabil di bawah 5% selama 4 tahun berturut-turut;

negara memiliki cadangan devisa USD 100-200 miliar; persamaan persepsi antara pemerintah/parlemen dan masyarakat yang di dalamnya meliputi pengusaha dan konsumen; dan landasan hukum yang kuat tentang redenominasi dan kebijakan pendukungnya (Bleaney & Veleanu, 2021). Beratnya syarat redenominasi memaksa negara berpikir beberapa kali untuk melakukannya.

Banyak negara dalam syarat ini sudah terpenuhi, salah satunya adalah Jepang. Namun kebijakan redenominasi belum merupakan hal yang urgen untuk dilaksanakan mengingat membutuhkan energi yang besar salah satunya adalah memberikan pendidikan yang menyeluruh pada masyarakat. Kesiapan masyarakat juga menjadi prioritas utama dalam kebijakan redenominasi (Asamoah & Owusu-agyei, 2020). Jepang bahkan berkali-kali melakukan kajian dalam implementasi redenominasi di negaranya. Dalam masyarakat tak jarang muncul persepsi bahwa digit yang banyak dalam sebuah mata uang dianggap mempunyai nilai rendah di hadapan mata uang asing (Opore-henaku et al., 2013).

Negara merupakan pemegang otoritas keuangan, yang berkewajiban mengeluarkan regulasi yang menstabilkan nilai mata uang, dengan mempertimbangkan sektor moneter dan sektor riil (Baeti et al., 2018). Negara pertama yang melakukan redenominasi adalah Jerman di tahun 1923 karena hiperinflasi dengan mengurangi 12 angka 0 (nol). Turki tercatat pula melakukan redenominasi yang berhasil, dengan mengurangi 6 angka 0 (nol) di tahun 2005. Dalam perspektif teori ilusi uang Turki telah berhasil menekan pembulatan nilai keatas terhadap suatu harga barang.

Teori ilusi uang pada dasarnya sebuah persepsi masyarakat pada nominal baru sebuah mata uang. Sebagai contoh, kesulitan mengenali nilai sebenarnya dari barang dan jasa diakibatkan adanya mindset lama pada digit nominal yang banyak. Contoh lain adalah di negara Ghana pasca redenominasi, dimana sebutan kepada “Miliader” jarang terjadi (Obuobi, Nketiah, Awuah, Agyeman, Ofosu, et al., 2020). Terdapat pula kasus dimana jumlah sumbangan menjadi lebih banyak pasca redenominasi. Hal ini dikarenakan adanya ilusi uang, dimana masyarakat masih terikat dengan nominal sama sebuah mata uang. Teori ilusi uang memungkinkan seseorang atau masyarakat cenderung merubah keputusan setelah terjadi perubahan nominal pasca redenominasi (Priyono et al., 2019).

Rusia, Argentina, Brazil, Korea Utara, dan Zimbabwe adalah contoh ketidakberhasilan pemerintah dalam melakukan redenominasi. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor. Namun yang menjadi faktor utama adalah kembali kepada syarat kelayakan sebuah negara dinilai mampu melakukan redenominasi, yaitu: kestabilan ekonomi; tingkat

inflasi yang terjaga; dan adanya jaminan stabilitas harga. Indonesia merupakan negara yang menggunakan pecahan terkecil 50 rupiah dan pecahan terbesar 100.000 rupiah. Sepanjang perjalanannya, digit yang digunakan dalam transaksi keuangan semakin bertambah. Alhasil dalam perspektif laporan keuangan hal ini akan memungkinkan terjadinya inefisiensi. Masyarakat sebagai pelaku ekonomi dalam beberapa kasus direpotkan dengan banyaknya nominal yang ada. Dalam berbagai kajian termasuk dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, disebutkan bahwa Indonesia telah siap dalam melakukan redenominasi (INDONESIA, 2020). Berdasar uraian tersebut tulisan ini berupaya untuk menggali lebih dalam kajian kesiapan Indonesia dalam melakukan redenominasi mata uang.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode literatur atau kepustakaan. Berikut adalah penjelasan mengenai metodologi penelitian tersebut: Metode Literatur atau Kepustakaan: Metode ini melibatkan analisis dan sintesis berbagai sumber data yang diperoleh dari artikel, kajian teori, dan regulasi pemerintah. Peneliti akan mencari dan mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik penelitian dari sumber-sumber tersebut. Metode literatur atau kepustakaan memiliki beberapa langkah yang dilakukan yaitu: Peneliti mencari sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian, seperti artikel ilmiah, buku, jurnal, dan regulasi pemerintah. Setelah sumber-sumber ditemukan, peneliti melakukan seleksi terhadap sumber-sumber yang paling relevan dan berkualitas untuk digunakan dalam penelitian. Peneliti membaca dan menganalisis sumber-sumber yang telah dipilih, mencari informasi yang relevan dengan topik penelitian dan mengidentifikasi pola, temuan, atau konsep yang muncul dari sumber-sumber tersebut. Setelah analisis dilakukan, peneliti menyusun sintesis atau rangkuman dari informasi yang ditemukan, menghubungkan temuan-temuan dari berbagai sumber untuk membentuk kesimpulan atau pemahaman yang lebih komprehensif mengenai topik penelitian. Metode literatur atau kepustakaan memiliki keuntungan sebagai berikut: Efisiensi, metode ini memungkinkan peneliti untuk mengakses informasi yang luas dan mendalam tanpa perlu melakukan penelitian lapangan yang memakan waktu dan biaya. Keanekaragaman sumber, peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber yang berbeda, seperti artikel, kajian teori, dan regulasi pemerintah. Hal ini dapat memberikan sudut pandang yang beragam dan

komprehensif terhadap topik penelitian. Keterjangkauan, sumber-sumber literatur umumnya mudah diakses melalui perpustakaan, jurnal online, atau basis data akademik. Hal ini memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Redenominasi merupakan langkah pemerintah dalam menegaskan kembali kedaulatan moneterinya. Dalam kondisi sebuah masyarakat tidak lagi peraya pada mata uangnya, maka penggunaan mata uang asing akan dinilai lebih prestige (Gunadi et al., 2018). Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa redenominasi bukan merupakan sistem yang bekerja sendiri, namun juga terkait dengan sektor riil perekonomian (Marimuthu & Maama, 2021). Selain itu teori menyebutkan bahwa redenominasi tidak akan mengubah perekonomian suatu negara apabila pengangguran dan kemiskinan masih menjadi problema; impor lebih besar dari ekspor; industri lokal yang terpuruk; penurunan nilai mata uang; dan biaya produksi yang mahal (Priyono, 2013). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa redenominasi bukan solusi utama menyelesaikan problematika perekonomian suatu negara.

Sejarah mencatat bahwa salah satu faktor utama dalam keberhasilan redenominasi adalah dalam hal tujuan utamanya. Belajar dari kegagalan Zimbabwe sebagai negara otoriter, redenominasi justru kian memperparah kondisi ekonomi. Masyarakat di sana sudah terbiasa disuguhi perhitungan hingga triliunan, sampai quadrilion, quintillion, dan bahkan sextilion. Pada akhirnya Dolar Amerika menjadi alternatif utama disana (Dzokoto et al., 2013). Korea Utara bahkan tidak menyediakan jumlah uang yang cukup ketika masyarakat ingin menukarkan uangnya (Mohammed, 2020). Sementara itu Turki berhasil melakukan redenominasi mengingat dukungan media yang terus mensupport kebijakan dan memberikan edukasi yang baik pada masyarakat, yang pada akhirnya meminimalisir dampak negatif redenominasi, yaitu pembuatan nilai keatas (Mumu et al., 2019). Turki secara nyata mengimplementasikan teori redenominasi dan meminimalisir teori ilusi uang.

Kebijakan redenominasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ialah menghilangkan 3 (tiga) digit 0 (nol) pada nilai uang, barang, dan jasa. Dengan kata lain, uang Rp.1000 akan menjadi Rp.1. walaupun terjadi pengurangan angka 0 (nol), namun tidak mengubah nilai riil dari mata uang tersebut. Secara kronologis dapat dijelaskan bahwa Indonesia telah melalui berbagai tahapan dalam kebijakan redenominasi yang dimulai sejak tahun 2010, dimana pada tahun ini digulirkan wacana redenominasi oleh

Gubernur Bank Indonesia saat itu. Selanjutnya di tahun 2011-2012 pemerintah secara resmi membentuk Tim Koordinasi Redenominasi, yang bertugas memberikan masukan dan melakukan kajian yang beroutput pada Rancangan Undang-undang (RUU) Redenominasi. Hasilnya ditahun 2013-2015 dilakukan sosialisasi pada masyarakat tentang redenominasi. Tahun 2016-2018 merupakan target pemerintah dalam melakukan penarikan uang lama. Pada tahun 2019-2020 adalah target awal redenominasi. Walau pada akhirnya redenominasi belum dilaksanakan, namun hal ini kembali diwacanakan pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, dimana di dalamnya memuat kembali wacana Rancangan Undang-undang (RUU) Redenominasi. Redenominasi sebelumnya telah tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, dimana redenominasi merupakan salah satu tugas dari Bank Indonesia dalam rangka menjalankan dan menjaga kelancaran sistem pembayaran yang efisien, aman, handal, dan cepat di Indonesia.

Redenominasi tidak hanya membawa pengaruh positif pada kepercayaan diri masyarakat terhadap mata uangnya, namun juga mempersepsikan bahwa suatu negara telah menjalankan kemajuan ekonomi sejalan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Hal ini mengingat integritas sebuah mata uang dapat meningkat di mata dunia (JACKSON & VANDY, 2022). Walaupun kegagalan redenominasi dapat berakibat pada laju inflasi yang tidak terkendali serta ketidakstabilan ekonomi di suatu negara, namun pada dasarnya redenominasi sebenarnya bukanlah sebuah sistem atau mekanisme untuk menurunkan angka inflasi, tetapi lebih kepada memberikan tingkat kepercayaan tertentu pada nilai mata uang yang disertai dengan berbagai kebijakan dalam mengatur kenaikan harga (Sesay et al., 2022). Redenominasi bukan sekedar penguatan dalam regulasi setingkat Undang-undang, namun juga menysasar pada berbagai regulasi di bawahnya pada segala sektor.

Apabila wacana redenominasi telah dikeluarkan oleh pemerintah, tentunya pemerintah juga telah menyiapkan hal pendukungnya, salah satunya dari aspek keuangan. Jika pemerintah merasa dari sisi keuangan telah siap, maka selanjutnya yang perlu mempersiapkan diri adalah berbagai instansi perbankan, industri, dll yang setiap hari melakukan transaksi keuangan, mengingat tidak sedikit pula energi yang harus dikeluarkan. Sebagai contoh, bank akan melakukan konfigurasi pada mesin ATM, toko pada mesin kasir, dll. Selain itu kekacauan transaksi keuangan dapat terjadi apabila tidak semua instansi melakukan sinkronisasi. Pada akhirnya redenominasi dalam kajian tulisan ini menunjukkan bahwa redenominasi telah siap dalam dalam hal regulasi. Namun dalam

implementasinya tidak dalam waktu dekat. Kunci keberhasilan redenominasi adalah pada waktu yang tepat (Židek & Chribik, 2015). Waktu ini adalah dimana inflasi ekspektasi inflasi suatu negara stabil dan rendah. Dengan demikian dapat tercapai perekonomian yang stabil; inflasi rendah dan stabil; serta adanya jaminan stabilitas harga (Obuobi, Nketiah, Awuah, Agyeman, & Ofosu, 2020). Selain itu perlu memberikan edukasi yang utuh dan secara konsisten kepada masyarakat terhadap potensi positif dan negatif dilakukannya redenominasi (Aziz & Hederstierna, 2009).

Sebagai alternatif, rencana redenominasi dapat mendupikasi konsep yang dilakukan oleh Turki dimana terdapat 3 (tiga) fase dalam implementasinya, yaitu: *pertama*, fase awal selama 3 (tiga) tahun untuk fokus pada RUU, rencana pencetakan uang; penyesuaian infrastruktur dan teknologi, serta public campaign dan edukasi yang intensif. *Kedua*, fase transisi selama 5 (lima) tahun, dimana nominal baru dan lama diberlakukan secara bersamaan. Pada saat ini UU maupun regulasi pendukung telah ada. *Ketiga*, fase finalisasi, dimana redenominasi sepenuhnya diimplementasikan.

KESIMPULAN

Sejarah perekonomian mencatat kegagalan dan keberhasilan negara-negara dalam melakukan redenominasi. Indonesia perlu mempertimbangkan kembali kajian pertumbuhan ekonomi dan kemungkinan laju inflasi. Secara administratif kebijakan redenominasi sudah dapat dimulai di Indonesia,, namun dalam impementasinya masih perlu kajian lebih mendalam terhadap keuntungan dan kerugian redenominasi. Hal ini dikarenakan stabilitas ekonomi Indonesia yang sepenuhnya belum dapat terjaga (diprediksi). Belajar dari kegagalan Argentina, Indonesia perlu mempertimbangkan potensi depresiasi nilai mata uang. Sedangkan belajar dari keberhasilan Turki, diperlukan edukasi yang baik dan tepat terhadap masyarakat agar tidak terjadi inflasi dan ilusi uang. Pada akhirnya, keberhasilan redenominasi ditentukan oleh kesiapan pemerintah dan masyarakat Indonesia. Redenominasi bukan sekedar kebijakan monumental sebuah periode kepemimpinan namun memerlukan kajian yang mendalam dalam implementasinya, disamping *public campaign* dan edukasi yang intensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul-salam, F. (2021). *Bounded Rationality in Currency Design and Status Effect in a Socialist Setting*. SIMON FRASER UNIVERSITY.
- Asamoah, J. Y., & Owusu-agyei, L. (2020). The Impact of ICT on Financial Sector Policy Reforms in Post-Financial crisis era in Ghana: An institutional theory perspective. *Finance & Banking Studies*, 9(2), 82–100.
- Astrini, D., Juanda, B., & Achسانی, N. A. (2016). Impact of Redenomination on Price, Volume, and Value of Transaction: an Experimental Economic Approach. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 19(2), 207–238.
- Aziz, R., & Hederstierna, A. (2009). *The Redenomination of the Ghanaian Currency, the Cedi (2007) A study of its impact on the business of the Financial Institutions in Ghana*. Blekinge Institute of Technology.
- Baeti, F. N., Juanda, B., & Asmara, A. (2018). Redenomination Policy and Economic Performance: Experimental and Historical Approach. *Signifikan*, 7(2), 173–184.
- Bleaney, M., & Veleanu, V. (2021). Redenomination risk in eurozone corporate bond spreads. *The European Journal of Finance*, 27(13), 1303–1325. <https://doi.org/10.1080/1351847X.2021.1882524>
- Dzokoto, V. A., Mensah, E. C., & Opare-Henaku, A. (2013). The Impact of Currency Redenomination on Monetary Gift Giving in Ghana: an Exploratory Assessment. *Business Studies Journal*, 5(2), 69–90.
- Gunadi, V., Lambey, L., & Tasik, H. H. D. (2018). Evaluating Financial Performances of Turkish Manufacturing Companies Before and After Redenomination. *Emba*, 6(4), 3368–3377.
- Handayani, S. W. (2020). Determining Factors Urge a Redenomination. *Ug Jurnal*, 14(05), 08–10.
- Ifunanya, O. C., Joseph, A., & Victoria, O. (2021). Redenomination of Naira: A Strategy for Inflationary Reduction. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 11(2), 472–481. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v11-i2/8860>
- Indonesia, M. K. R. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 77/PMK.01/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024*.
- Jackson, e. a., & Vandy, p. s. (2022). A Model Approach to Understanding Monetary Aggregates Growth in Sierra Leone and Implications for Policy Formulation. *Theoretical and Practical Research in Economic Fields*, XIII(1).
- Karnadi, E. B., & Adijaya, P. R. (2017). Redenomination: Why is It Effective in One Country but Not in Another? *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(3), 186–195.
- Marimuthu, F., & Maama, H. (2021). Currency redenomination and firm value growth: Lessons from a developing economy. *Investment Management and Financial Innovations*, 18(1), 223–235. [https://doi.org/10.21511/imfi.18\(1\).2021.19](https://doi.org/10.21511/imfi.18(1).2021.19)
- Mohammed, H. A. (2020). Expectations of High Currency Redenomination in Commercial Banks Transaction Cost of Nigeria. *IJISSET - International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology*, 7(7), 376–385.
- Mumu, S., Muloke, W., & Maase, A. (2019). Analysis of Rashomon Effects on Government Policy Regarding Redenomination and Sanering. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 23(1), 138–145.
- Obuobi, B., Nketiah, E., Awuah, F., Agyeman, F. O., & Ofosu, D. (2020). Impact of Currency Redenomination on an Economy: An Evidence of Ghana Impact of Currency Redenomination on an Economy: An Evidence of Ghana. *International*

- Business Research*, 13(2), 62–73. <https://doi.org/10.5539/ibr.v13n2p62>
- Obuobi, B., Nketiah, E., Awuah, F., Agyeman, F. O., Ofosu, D., Adjei, M., & Amadi, A. G. (2020). Impact of Currency Redenomination on an Economy: An Evidence of Ghana. *International Business Research*, 13(2), 62–73. <https://doi.org/10.5539/ibr.v13n2p62>
- Opare-henaku, A., Mensah, E. C., & Dzokoto, V. A. (2013). Ghanaians ' Perception and Evaluation of the New Ghana Cedi. *International Journal of Business, Humanities and Technology*, 3(4), 1–8.
- Prabawani, B. (2017). Potential Impacts of Redenomination: a Business Perspective. *International Journal of Business and Society*, 18(2), 295–308.
- Priyono. (2013). Redenomination; Between Hope and Reality East Java in Indonesia. *International Journal of Business and Management Invention*, 2(4), 36–40.
- Priyono, Putra, B. C., & Putri, C. C. (2019). Redenomination : Between Opportunities and Challenges Study of the Implementation of Redenomination in Indonesia. *Journal of Applied Economics and Business*, 7(2), 5–27.
- Sesay, D. K., Bah, C. J., Mansaray, I., & Kanu, A. S. (2022). Assessing the impact of currency redenomination: An appraisal of the bank of Sierra Leone ' s redenomination proposal. *International Journal of Multidisciplinary Research and Growth Evaluation*, 3(1), 328–331.
- Tjandrasa, B. B., & Lomo, I. A. (2018). Variables Affecting The Level of Acceptance on Redenomination Policies. *seajbel - South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 16(5).
- Židek, L., & Chribik, M. (2015). Impact of Currency Redenomination on Inflation Case Study Turkey. *Asian Economic and Financial Review*, 5(6), 908–914. <https://doi.org/10.18488/journal.aefr/2015.5.6/102.6.908.914>